

ANALISIS PENGARUH TRANSFER PRICING DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Penelitian pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 - 2021)

Oleh :

Dematria Pringgabayu^{1,2},

Imas Purnamasari²,

Budi Supriatono Purnomo²

¹Politeknik Pajajaran ICB Bandung, Indonesia

²Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia

Article Info

Article History :

Received 16 Des - 2022

Accepted 25 Des - 2022

Available Online

30 Des – 2022

Abstract

This study aims to examine the influence of transfer pricing variables, institutional ownership, and managerial ownership to tax avoidance either partially or simultaneously. This research method used is quantitative method by using descriptive explanative method. This study uses secondary data in the form of financial statements of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2017 to 2021 with a population of 33 companies and 132 samples. The analytical method used to measure the effect of transfer pricing, ownership structure to tax avoidance is multiple linear regressions. The results show that transfer pricing does not affect tax avoidance because it does not have significant implications (no effect) because the potential taxable income (although shifted from one to another agency) was still within the same jurisdiction of taxation. Meanwhile, the result of the research shows that the variable of institutional ownership has a negative effect on tax avoidance because the large concentration of institutional ownership will influence the aggressive tax policy and the managerial ownership does not affect the tax avoidance because the company in Indonesia has a very small managerial ownership of about 5%.

Keyword :

Transfer Pricing, Ownership Structure, Aggressive Tax Avoidance.

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji *transfer pricing* dan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap *Aggressive Tax Avoidance*. Secara umum *transfer pricing* merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis *financial* maupun transaksi lainnya. (Gunadi, 2007). Menurut Tsurumi (1984) dalam Gunadi, 2007 suatu grup perusahaan, *transfer pricing* (sering disebut dengan istilah *intercompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional pricing*, atau *internal pricing*), merupakan harga yang diperhitungkan untuk pengendalian manajemen (*management control*) atas transfer barang dan jasa dalam satu grup perusahaan. *Tax avoidance* didefinisikan sebagai kemampuan untuk membayar jumlah kas pajak yang rendah/*Cash-ETR* (sebagai lawan GAAP-beban pajak yang ada

dalam catatan pajak perusahaan) terhadap laba sebelum pajak pada perusahaan (Dyreng, S., Hanlon, M., Maydew, E. 2008).

Aggressive tax avoidance juga didefinisikan sebagai tindakan manajemen untuk mengecilkan pajak penghasilannya melalui kegiatan perencanaan pajak (Richardson, G., & Lanis, R. 2017; Frank, M.M., Lynach., & Rego, S.O. 2009; Chen, Shuping, Xia Chen, Qiang Cheng. 2010; Hanlon, M., Mills, L., & Slemrod, J. 2009). Selain itu karena perusahaan Multinasional memiliki posisi dalam hal prinsip yaitu apa yang digunakannya pasti akan menguntungkan bagi kelompoknya, sehingga perusahaan multinasional menggunakan harga yang menyimpang dari harga yang berlaku umum. Maka, perusahaan Multinasional dapat menggunakan *transfer pricing* yang rendah dari *arm's length price*, yang tujuannya mengefisienkan beban pajak atau dengan cara menggunakan harga yang tinggi dari

arm's length price untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu kegiatan *aggressive tax* ini mencakup kegiatan perencanaan pajak yang legal atau yang mendekati *grey area*, serta kegiatan yang ilegal (Richardson, G., & Lanis, R. 2017).

Beberapa kasus *transfer pricing* diantaranya PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *completely built up* (CBU) mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau *complete knock down* (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak "atas nama" Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd – yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura. Dari kasus diatas disimpulkan bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk menghindari pajak di Indonesia apabila menjual langsung ke Filipina dan Thailand mereka dengan sengaja menjual produk tersebut ke Toyota Motor Asia Pasific Ltd dikarenakan memanfaatkan *tax heaven country* yang ada di Singapura.

Starbucks Inggris memanfaatkan celah hukum dan *tax heaven* di Belanda melalui cabang starbucks yang berada di Belanda. Penghasilan starbucks Inggris ditransfer ke starbucks Belanda bernama Starbucks Coffee EMEA BV sebagai biaya lisensi dan royalti bagi Starbucks Coffee EMEA BV di Belanda. Jika menggunakan pola *anti-transfer pricing* yang benar, starbucks Inggris seharusnya menransfer biaya itu pada cabang terdekat Starbucks Coffee EMEA BV yang berada di Inggris. Untuk meyakinkan bahwa kerugian yang didapat starbucks Inggris adalah benar, operasi Starbucks Inggris dibiayai melalui utang dari cabang-cabang Starbucks lainnya di negara lain. Sehingga, biaya pembayaran utang dan bunga akan mengurangi penghasilan dari starbucks

Inggris, sementara keuntungannya ditransfer ke negara Belanda yang tarif pajaknya sangat kecil. Agar lebih meyakinkan lagi, pembelian biji kopi starbucks dibeli dari starbucks di Swiss.

Meski sebenarnya biji kopi itu tidak dibeli dari starbucks Inggris, melainkan dari banyak negara lain. Hal yang digunakan adalah karena starbucks di Swiss yang memiliki hak hukum atas biji kopi tersebut, sehingga seakan-akan starbucks Inggris membeli biji kopi dari starbucks Swiss yang pajak penjualannya rendah, hanya sebesar 2% dari nilai penjualan. Hal utama dari pemanfaatan *tax heaven* oleh starbucks adalah transfer penghasilan starbucks di Inggris ke luar negeri, yaitu ke Belanda sebagai negara *tax heaven*. Dalam kurun waktu 3 tahun, dengan berbagai praktik yang dilakukan, starbucks Inggris mengakui kerugian dan tidak dikenakan pajak selama itu juga di Inggris. Kaitan kasus starbucks dengan etika bisnis internasional adalah etika bisnis internasional ada untuk mengurangi tindak kecurangan-kecurangan yang dilakukan perusahaan dan menghindari eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, dalam kasus starbucks, eksploitasi yang dilakukan adalah eksploitasi keuntungan. Bila mengacu kepada De George Rule, yaitu 10 aturan internasional yang mengatur keberlangsungan korporasi multinasional, starbucks Inggris telah melanggar aturan pertama dan keenam dalam etika bisnis internasional, yaitu (1) korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung dan (6) korporasi internasional harus membayar pajak dengan *fair* (adil). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa starbucks Inggris telah melanggar etika bisnis internasional dan bertindak amoral seperti yang dikatakan oleh salah satu perwakilan otoritas pajak Inggris yang mengintrogasi CFO starbucks Inggris.

(<http://merrydewiputri.com/2021/06/02/tax-planning-dalam-transfer-pricing-versi-perusahaan-starbucks/>) (diakses tanggal 11 Juni 2017).

Penelitian ini meneliti kembali atas penelitian-penelitian sebelumnya untuk menguji *Tax Avoidance*. Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang penelitian ini, maka penelitian ini di organisir dalam 5 (lima) bagian. Setelah pendahuluan, bagian 2 mengulas kajian teoritis dan perumusan hipotesis, bagian 3 menjelaskan metode penelitian ini, dilanjutkan dengan bagian 4 yang menjelaskan hasil penelitian dan pembahasannya, dan diakhiri kesimpulan dan saran.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Teori Stakeholders

Istilah *stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh *Stanford Research Institute* (SRI) pada tahun 1963. *Stakeholder* didefinisikan sebagai “Any group or individual who can be affected by the achievement of an organization’s objective”. Yang artinya *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi.

Tanggung jawab perusahaan yang semula fokus pada indikator ekonomi dalam laporan keuangan, saat ini telah bergeser dan lebih memperhitungkan faktor-faktor sosial terhadap *stakeholder*, baik internal maupun eksternal (Hamdani, 2021). Untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan, sangat tergantung kepada dukungan para *stakeholder*. Makin banyak dukungan dari *stakeholder*, makin besar kemampuan perusahaan beradaptasi dengan lingkungan. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*. Menurut Hamdani (2021), *stakeholder* perusahaan terdiri dari *Shareholder*, *Investor*, *Customer*, *Suppliers*, *Government*, *Natural Environment*, dan *Local Communities*.

Teori Kepatuhan Pajak

Machfud Sidik yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:137-138) yaitu Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Teori Keagenan

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dengan pemegang saham (*principal*) pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Hubungan keagenan didefinisikan sebagai suatu kontrak yang mana satu atau lebih *principal* menggunakan orang lain atau agen untuk menjalankan aktivitas perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Natasari, 2014).

Transfer Pricing

Transfer Pricing digunakan untuk mengukur efektifitas departemen dari suatu perusahaan untuk melihat kinerja keseluruhan perusahaan tersebut, Suandy (2006). Penelitian yang dilakukan Richardson, Grantley (2012) yang berkaitan dengan *transfer pricing* dimana penelitian yang berjudul *Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: Empirical Evidence from Australian firms* menyimpulkan bahwa profitabilitas, leverage, aset tidak berwujud dan multinasional berhubungan positif terhadap *transfer pricing* agresivitas, sedangkan hasil dari

regresi tambahan menunjukkan *Transfer Pricing* meningkat melalui aset tidak berwujud dan multinasionalitas serta adanya variabel kontrol yang digunakan yaitu ukuran perusahaan dan sektor industri. Pada prinsipnya *transfer pricing* dapat melibatkan baik transaksi domestik maupun global. Dari aspek pajak penghasilan, *transfer pricing* domestik tidak membawa implikasi yang signifikan karena potensi penghasilan kena pajaknya (walaupun digeser dari satu ke lain badan) masih berada dalam satu yuridiksi pemajakan yang sama, (Gunadi, 2007). Penggeseran potensi pajak tersebut dapat memberikan manfaat pada grup perusahaan secara keseluruhan dalam rangka, misalnya (1) pemerataan penghasilan kena pajak (*base averaging*) dengan mengalokasikan laba pada beberapa subyek pajak untuk mengurangi kemungkinan terkena progresivitas tarif (30% atau 15%), dan (2) arbitrase kerugian (*loss arbitrage*) dengan menggeser laba kepada subjek pajak yang masih berhak atas kompensasi kerugian. (Gunadi, 2007).

Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajerial) (Tamba, 2011).

Kepemilikan Institusional

Gedajlovic dan Shapiro (2002) berpendapat bahwa kepemilikan saham oleh institusi atau perusahaan akan mampu memberikan pengendalian yang efektif bagi manajemen perusahaan karena padatnya jaringan bisnis, utang, dan modal perusahaan.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan pemisahan kepemilikan antara pihak outsider dengan pihak insider. Jika dalam suatu perusahaan memiliki banyak pemilik saham, maka kelompok besar individu tersebut sudah jelas tidak dapat berpartisipasi dengan aktif dalam manajemen perusahaan sehari-hari. Karenanya, mereka memilih dewan komisaris, yang memilih dan mengawasi manajemen perusahaan. Struktur ini berarti bahwa pemilik berbeda dengan manajer perusahaan. Hal ini memberikan stabilitas bagi perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan dengan pemilik merangkap manajer, (Bodie: 2006).

Profitabilitas

Menurut Niresh dan Velnampy (2014:57) Profitabilitas adalah sejumlah uang perusahaan yang dapat dihasilkan dari sumberdaya apapun yang dimiliki perusahaan. Profitabilitas menurut Brigham dan Houston (2006) adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu tolak ukur tersebut adalah dengan rasio keuangan sebagai salah satu analisa dalam menganalisa kondisi keuangan, hasil operasi dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan.

Definisi lain yang dikemukakan oleh Fahmi (2012:68) bahwa rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin tinggi rasio profitabilitas maka akan semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.

Leverage

Leverage menurut Sartono (2001) adalah penggunaan sumber dana yang dimiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Beban tetap ini dapat berupa bunga pinjaman, jika perusahaan menggunakan sumber pembelanjaan dari luar (modal asing), sedangkan apabila perusahaan menggunakan mesin-mesin, maka menanggung beban tetap yang berupa biaya penyusutan mesin-mesin (depresiasi).

Wild, Subramanyan, dan Hasley (2008:213) mengemukakan bahwa “motivasi utama perusahaan memperoleh pendanaan usaha melalui utang adalah potensi biaya yang lebih rendah”. Dari sudut pandang pemegang saham, utang lebih murah dibandingkan dengan penggunaan eukitas, hal ini didasarkan karena bunga sebagian besar jumlahnya tetap, dan jika bunga lebih kecil dari pengembalian yang diperoleh dari pendaan utang, selisih lebih dari atas pengembalian akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas Wild, Subramanyan, dan Hasley (2008:213). Selain itu, bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak sedangkan deviden tidak, dampaknya adalah besarnya pajak yang ditanggung perusahaan akan semakin kecil sebagai akibat dari penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pengembalian. Wild, Subramanyan, dan Hasley (2008:213).

Size

Menurut Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2006) ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset dan total ekuitas.

Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah, (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang, hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil, (Rachmawati dan Triatmoko, 2007).

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Menurut Darussalam (2009), *Tax avoidance* biasanya dapat diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Sementara menurut OECD *Tax Avoidance* biasanya dipergunakan untuk menjelaskan usaha-usaha wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya.

Menurut Lanis dan Richardson (2017) menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan menggunakan GAAP ETR untuk mengukur Aggresivitas Pajak karena GAAP ETR yang paling banyak digunakan untuk mengukur *Tax Avoidance* dalam literatur. Lanis dan Richardson (2017) alasan menggunakan GAAP ETR bahwa GAAP ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada literatur penelitian terdahulu. Semakin rendah nilai GAAP ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur yang telah *go public* dan sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode

purposive sampling, maka terdapat 33 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang dijadikan sampel.

Pengukuran variabel independen yang meliputi *transfer pricing* dan struktur kepemilikan diukur sebagai berikut :

1. Variabel *transfer pricing* diukur dengan menggunakan *TP Disclosure Index* dilakukan dengan menggunakan pendekatan dikotomi, yaitu setiap *item* TP dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Rumus perhitungan TP adalah sebagai berikut:

$$TP = \frac{\sum_{xij}}{7}$$

Dimana:

TP : *TP Disclosure Index* perusahaan

nj : jumlah *item* untuk perusahaan j, nj = 7

Xij : 1 = jika *item* i diungkapkan; 0 = jika *item* i tidak diungkapkan.

2. Kepemilikan Institusional

Dalam penelitian ini kepemilikan institusional akan diukur dengan menghitung total saham yang dimiliki pemegang saham institusi dibandingkan dengan total saham yang beredar, seperti yang dilakukan oleh Koubaa dan Anis (2015). Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KEI = \frac{\text{Total Saham yang Dimiliki Pemegang Saham Institusi}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$$

3. Kepemilikan Manajerial

Dalam penelitian ini kepemilikan manajerial akan diukur dengan menghitung persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen/Direksi perusahaan dibandingkan dengan jumlah seluruh saham yang beredar seperti yang dilakukan oleh penelitian Melinda (2008). Kepemilikan manajerial ini dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Manajemen / Direksi Perusahaan}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$$

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai variabel kontrol, diantaranya :

1. Profitabilitas. Dalam penelitian ini *Return On Asset* (ROA) dipilih sebagai indikator profitabilitas. *Return on Asset* (ROA) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \text{Net Income} / \text{Total Asset}$$

2. *Leverage*. Dalam penelitian ini *leverage* diukur menggunakan *Debt to Total Asset Ratio* (DAR), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DER = \text{Total debt} / \text{Total Equity} * 100\%$$

3. *Size* Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan adalah Ln total asset.

Pengukuran variabel dependen yaitu *tax avoidance* menggunakan GAAP ETR dalam penelitian Lanis, Richardson (2012), Hanlon dan Heitzman (2010) yaitu dengan rumus :

$$GAAP\ ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Model penelitian regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan software *eviews*. Untuk menganalisis data, penulis melakukan analisis deskriptif untuk menentukan batas model regresi, pengujian R² dan pengujian hipotesis pada hasil regresi menggunakan t-statistik dan F-statistik. Berikut model yang akan diuji :

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 \text{Transfer Pricing} + \beta_2 \text{Kepemilikan Institusional} + \beta_3 \text{Kepemilikan Manajerial} + e$$

Dimana:

α = Konstanta

$\hat{Y}$ = *Tax Avoidance* dengan GAAP ETR

β = *Slope* atau koefisien regresi atau *intersep*

X₁ = *Transfer Pricing*

X_{2,1} = Kepemilikan Institusional

X_{2,2} = Kepemilikan Manajerial

e = *Error*

4. HASIL PENELITIAN

Tabel 1
Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics

	<i>N</i>	<i>Mean</i>	<i>Maximum</i>	<i>Minimum</i>	<i>Std. Deviation</i>
<i>TP</i>	132	,40476190	,571429	,000000	,134622731
<i>K_INS</i>	132	,71210674	,981923	,000000	,177823811
<i>K_MGT</i>	132	,04399681	,488427	,000000	,104899947
<i>PROFIT</i>	132	,16133225	4,276634	,019469	,375259734
<i>LEV</i>	132	,78592439	5,152418	,109234	,669522147
<i>SIZE</i>	132	28,74306974	33,198812	25,676961	1,704462568
<i>TA</i>	132	,25130284	,326509	,177549	,024612093
<i>Valid N (listwise)</i>	132				

Sumber : evIEWS, data diolah

Tabel 1 menunjukkan hasil analisis deskriptif dengan jumlah laporan Tahunan (*N*) dari penelitian ini ada 132 data dari 33 perusahaan yang menjadi sampel.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Uji Multikolinieritas

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors

Date: 07/15/17 Time: 20:32

Sample: 1 132

Included observations: 132

<i>Variable</i>	<i>Coefficient Variance</i>	<i>Uncentered VIF</i>	<i>Centered VIF</i>
<i>C</i>	0.001188	880.2960	NA
<i>TP</i>	0.000136	16.93699	2.720902
<i>K_INS</i>	0.000130	49.90765	1.318519
<i>K_MGT</i>	0.000226	2.191755	1.268251
<i>PROFIT</i>	9.46E-06	1.760456	1.504022
<i>LEV</i>	8.17E-06	4.530291	1.611427
<i>SIZE</i>	1.65E-06	977.6500	2.080305

Sumber : EvIEWS 9 data diolah kembali

Berdasarkan hasil yang tersaji pada tabel di atas, dapat disimpulkan model regresi yang akan dibentuk terbebas dari multikolinearitas, dikarenakan keenam variabel bebas memiliki nilai VIF yang kurang dari 10.

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$). Pada tabel 4.2 nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0.332997 atau 33%. Hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel

Uji Koefisien Determinasi

bebas yang diuji yang terdiri dari *Transfer Pricing*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, memberikan kontribusi terhadap *tax*

avoidance sebesar 33%, sedangkan 67% lainnya merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 3
Hasil Uji *R Squares*

Dependent Variable: TA

Method: Least Squares

Date: 07/10/17 Time: 14:09

Sample: 1 132

Included observations: 132

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, User bandwidth = 10.0000)

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>C</i>	0.379080	0.034463	10.99969	0.0000
<i>TP</i>	-0.015103	0.011669	-1.294275	0.1980
<i>K_INS</i>	0.030862	0.011417	2.703118	0.0078
<i>K_MGT</i>	-0.006176	0.015036	-0.410707	0.6820
<i>PROFIT</i>	-0.001951	0.003075	-0.634376	0.5270
<i>LEV</i>	0.011614	0.002858	4.063835	0.0001
<i>SIZE</i>	-0.005295	0.001284	-4.124574	0.0001
<i>R-squared</i>	0.332997	<i>Mean dependent var</i>		0.251303
<i>Adjusted R-squared</i>	0.300981	<i>S.D. dependent var</i>		0.024612
<i>S.E. of regression</i>	0.020578	<i>Akaike info criterion</i>		-4.877663
<i>Sum squared resid</i>	0.052929	<i>Schwarz criterion</i>		-4.724787
<i>Log likelihood</i>	328.9258	<i>Hannan-Quinn criter.</i>		-4.815541
<i>F-statistic</i>	10.40092	<i>Durbin-Watson stat</i>		2.175667
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000	<i>Wald F-statistic</i>		10.60315
<i>Prob(Wald F-statistic)</i>	0.000000			

Sumber: Eviews 9 data diolah kembali

Dari hasil pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Nilai p-value adalah 0.099 (*sig*) lebih besar dari alpha 0.05 (*confidence interval*), maka dapat disimpulkan bahwa *Transfer Pricing* (X_1) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y). Hasil Penelitian ini senada juga diungkapkan oleh Gunadi (2007), *transfer pricing* domestik tidak membawa implikasi yang signifikan (tidak berpengaruh) karena potensi penghasilan kena pajaknya (walaupun digeser dari satu ke lain badan) masih berada dalam satu yuridiksi pemajakan yang sama.

Gunadi (2007) juga mengungkapkan penggeseran potensi pajak tersebut dapat memberi manfaat pada grup perusahaan secara keseluruhan dalam rangka, misalnya (1) pemerataan penghasilan kena pajak (*base averaging*) dengan mengalokasikan laba pada beberapa subyek pajak untuk mengurangi kemungkinan terkena progresivitas tarif (30% atau 15%), dan (2) *arbitrage* kerugian (*loss arbitrage*) dengan

menggeser laba kepada subyek pajak yang masih berhak atas kompensasi kerugian.

Dari hasil pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance* maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai p-value adalah 0.0039 (*sig*) lebih kecil dari alpha 0.05 (*confidence interval*), dan koefisien β_1 positif pada model regresi dengan nilai koefisien 0.030862 maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2009) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan *long-term share-holder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.

Dari hasil pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Tax Avoidance* maka H_0 diterima dan H_a

ditolak. Nilai p-value adalah 0.341 (*sig*) lebih besar dari α 0.05 (*confidence interval*), maka dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Manajerial ($X_{2.2}$) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y). Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Agustia (2017). Walaupun pihak manajer mempunyai peluang untuk menggunakan strategi agresivitas pajak untuk meningkatkan bonus manajer dan deviden yang dimilikinya, namun seorang manajer sekaligus pemegang saham tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan agresivitas pajak perusahaan. Agustia (2017) menyatakan tidak berpengaruhnya kepemilikan manajerial disebabkan perusahaan di Indonesia rata-rata kepemilikan manajerialnya sangat kecil yaitu sekitar dibawah 5%.

Dari hasil pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Nilai p-value adalah 0.5270 (*sig*) lebih besar dari α 0.05 (*confidence interval*), maka dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas (X_3) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Agresivitas pajak dilakukan dengan menurunkan *pretax income* sehingga beban pajak perusahaan rendah, namun semua perusahaan berupaya untuk memperoleh laba yang tinggi. Profitabilitas perusahaan besar yang mengindikasikan kinerja perusahaan baik. Perusahaan memilih untuk tidak melakukan agresivitas pajak dengan cara menurunkan *pretax income* karena hal tersebut akan menurunkan ROA perusahaan.

Dari hasil uji pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai p-value adalah 0.001 (*sig*) lebih kecil dari α 0.05 (*confidence interval*), dan koefisien β_1 positif sebesar 0.011614 maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* X_4 berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y). Penelitian yang dilakukan ini didukung oleh Zhou (2011) dan Chen et al (2010) yang menyatakan perusahaan menggunakan hutang untuk menghindari agresivitas pajak. Watts dan Zimeerman (1978, Hal 115), politisi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi distribusi kembali kekayaan perusahaan melalui pajak perusahaan, peraturan, subsidi, dll. Selain itu, beberapa kelompok memiliki untuk menegosiasi “nasionalisasi, pengambilalihan keputusan atau pengaturan perusahaan”, yang pada saatnya dapat memberikan insentif kepada politisi untuk mengajukan tindakan tersebut. Gagasan bahwa politisi berusaha untuk mengganggu urusan korporasi dan mendistribusikan kekayaan dari

mereka (Stigler 1971), Peltzman (1976), dan Jensen & Meckling (1978).

Dari hasil *Size* terhadap *Tax Avoidance* maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai p-value adalah 0.001 (*sig*) lebih kecil dari α 0.05 (*confidence interval*) maka dapat disimpulkan bahwa *size* X_5 berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y). Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Zhou (2011), dan Rusydi dan Martani (2014) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Semakin besar ukuran perusahaan semakin kecil ETR yang mengindikasikan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya (*asset*) untuk membuat suatu perencanaan pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ;

- Secara parsial *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- Secara parsial Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.
- Secara parsial Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- Secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh terhadap terhadap *Tax Avoidance*. Secara parsial *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial *size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak
- Secara simultan *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, *Profitabilitas*, *Leverage* dan *Size* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustia, Dian. 2017. “Pengaruh Faktor *Good Corporate Governance*, *Free Cash Flow* dan *Leverage* Terhadap Manajemen Laba”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 15, No. 1, Mei . Hal 27-42.
- Brigham, Eugene F dan Joel F. Houston. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Alih bahasa Ali Akbar Yulianto. Buku Satu. Edisi Sepuluh. PT. Salemba Empat. Jakarta.
- Chaganti Rajeswararao, Damanpour Fariborz. 1991. “*Institutional Ownership, Capital Structure and Firm Performance*”. Strategic Management Journal, Vol 12. 479-491.
- Chen, Shuping, Xia Chen, Qiang Cheng. 2010. “Are family firms more tax aggressive

- than non-family firms?”. *Journal of Financial Economics* 58 (2010) 81-112.
- Darussalam. & Septriadi, D., 2009. Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rules.
- Dyrend, S., Hanlon, M., Maydew, E. 2008. “Long run corporate tax avoidance”. *The Accounting Review* 83, 61-82.
- Fahmi, Irham. 2012. “*Analisis Kinerja Keuangan*”. Bandung: Alfabeta.
- Frank, M.M., Lynach, J.L., & Rego, S.O. 2009. “Are financial and tax reporting aggressiveness reflective of broader corporate policies?”. *The Accounting Review*, 84(2), 467-469.
- Gedajlovic E.R. dan Shapiro, D.M. (2002). Ownership Structure and Firm Profitability in Japan. *Academy of Management Journal* 45:565-567.
- Gunadi. 2007. *Transfer Pricing*. Pajak Internasional. Universitas Indonesia. Hal : 228-229. Jakarta.
- Hanlon, M., Mills, L., & Slemrod, J. 2009. “What does tax aggressiveness signal?” Evidence firm stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics* 93 (2009) 126-141.
- Jensen, C., Michael dan Meckling, H., William. 1976. Dalam Natasari. 2004. “Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure”. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 18. PPJK*.
- Jensen, M.C., and Meckling, W.H., 1978. “Can the Corporation Survive?” *Financial Analysts Journal*, Vol. 34, Jan-Feb, pp. 31-37.
- Khurana, I.K. dan W.J. Moser. 2009. “*Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*”. www.ssrn.com
- Lanis, R., dan Richardson, G. 2012. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: an Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*. 31, 86-108.
- Marcus, Kane dan Bodie. 2006. *Investment*. Jakarta : Salemba Empat.
- Niresh, J. Aloy & T. Velnampy. 2014. “Firm Size and Profitability: A Study of Listed Manufacturing Firms in Sri Lanka”. *International Journal of Business and Management*. Volume 8 Hal 57-64.
- Peltzman, S., 1976. “Toward a More General Theory of Regulation”, *Journal of Law and Economic*, Vol. 19 pp. 211-240.
- Rachmawati, Andri., dan Triatmoko, Hanung. 2007. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X*. Makassar.
- Richardson G., dan Grantley, 2012. “International Corporate Tax Avoidance Practices : Evidence from Australian Firms”. *The International Journal of Accounting* 47, I hal. 469-496.
- Richardson, G., & Lanis, R. 2017. “The Impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness”: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Economics*, 31(2), 321-387.
- Rusydi, M. Lhoiru dan Dwi Martani. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax Avoidance. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Pp.1-19.
- Sartono, R. Agus. 2001. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta BPFE.
- Stigler, G.J., 1971. “The Theory of Economic Regulation”, *The Bell Journal of Economic and Management Science*, Vol. 2, pp. 3-21.
- Suandy, Erly. 2006. “*Perencanaan Pajak*”. Jakarta : Salemba Empat Siti Kurnia Rahayu, dan Ely Suhayati. 2010. “Perpajakan”. *Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Tsurumi, Yoshi. 1982. *Multinational Management-Business Strategy and Government Policy* (Second Edition). Ballinger Publishing Coy, Massachusetts.
- Suwito, Edy., dan Herawaty, Arleen. 2005. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan Oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo.
- Tamba, Erida G.H. 2011. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Watts. R.L. & Zimmerman. J.L., 1978. “Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards”, *The Accounting Review*, Vol. 53, No. 1, pp. 112-134.
- Wild, John J, K.R. Subramanyam dan Robert F. Halsey. (2008:213). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kedelapanan. Jilid 2.

Diterjemahkan oleh Dodo Suharto
dan Herman Wibowo. Salemba
Empat. Jakarta.

Zhou Ying (2011). Owner Stucture, Board
Characteristics, and Tax
Aggressiveness. Thesis. Lingnan
University.